

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TAHUN 2019



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JANUARI 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019 dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. LKj ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan guna mencapai sasaran strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2015-2019.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan LKj ini. Semoga LKj Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019 dapat bermanfaat sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasinya pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2020
Direktur,



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
C. Organisasi dan Tata Kerja	7
D. Sumber Daya.....	7
E. Sumber Dana.....	8
F. Sarana Prasarana	8
G. Peraturan Perundang - Undangan	9
BAB II PERENCANAN KINERJA	10
A. Renstra 2015 – 2019	10
B. Rencana Kerja 2019.....	11
C. Perjanjian Kinerja 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019	13
A. Capaian Kinerja	13
Perhitungan Capaian Kinerja	13
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019	28
Perhitungan Realisasi Anggaran.....	28
Perhitungan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja.....	29
Dampak terhadap Indikator Makro Nasional	30
C. Capaian Indikator Tujuan	30
D. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional	30
E. Capaian Aksi Tematik	31
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Kawasan Hutan	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat PPH	11
Tabel 3	Target Kinerja Tahun 2019 Direktorat PPH.....	12
Tabel 4	Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019	13
Tabel 5	Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019	14
Tabel 6	Status senjata api tahun 2019	24
Tabel 7	Jumlah polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Tahun 2019	24
Tabel 8	Daftar pengadaan barang dan jasa	27
Tabel 9	Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019	29
Tabel 10	Capaian indikator tujuan tahun 2019	30
Tabel 11	Capaian kegiatan Prioritas Nasional tahun 2019	31
Tabel 12	Capaian aksi tematik tahun 2019	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Direktorat PPH.....	10
Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 – 2019	14
Gambar 3 Rekapitulasi jumlah kegiatan Operasi tahun 2015 – 2019	14
Gambar 4 Pengamanan barang bukti kayu ilegal asal Papua dan Papua Barat di Surabaya.....	15
Gambar 5 Barang bukti kayu ilegal di Provinsi Kalimantan Timur.....	15
Gambar 6 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan	16
Gambar 7 Penyegehan area pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan Provinsi Riau	16
Gambar 8 Penyegehan area pertambangan ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	17
Gambar 9 Penyegehan perusahaan pembakar lahan di Provinsi Kalimantan Barat	17
Gambar 10 Lokasi Operasi Penambangan Ilegal di Cileungsi, Kabupaten Bogor	18
Gambar 11 Dokumentasi hasil operasi peredaran TSL.....	18
Gambar 12 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2019.....	19
Gambar 13 Dokumentasi rapat koordinasi penanganan kejahatan kehutanan.....	19
Gambar 14 Dokumentasi pelaksanaan MLA di Denpasar, Bali	20
Gambar 15 Dokumentasi kegiatan pelatihan penerbangan pesawat tanpa awak di Sulawesi (kiri) dan pelatihan inovasi dalam mitigasi resiko bencana di Hungaria (kanan).....	20
Gambar 16 Dokumentasi kegiatan sosialisasi SPARTAN di Menado (kiri) dan Bukittinggi (kanan)	21
Gambar 17 Dokumentasi jerat yang berhasil diamankan	21
Gambar 18 Hasil monitoring perdagangan daring satwa liar	22
Gambar 19 Tangkapan Layar Sistem Intelijen Polhut.....	23
Gambar 20 Perbandingan jumlah tenaga pengamanan hutan yang ditingkatkan kapasitasnya	24
Gambar 21 Apel Siaga	25
Gambar 22 Latihan Menembak.....	25
Gambar 23 Diklat Intelijen Dasar	25
Gambar 24 Penyerahan Penghargaan Wanalestari	25
Gambar 25 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum	26
Gambar 26 Kampanye / Sosialisasi dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum.....	26
Gambar 27 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan untuk Penyelamatan DAS Citarum	27
Gambar 28 Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan untuk Penyelamatan DAS Citarum	27
Gambar 29 Grafik perbandingan realisasi anggaran Dit. PPH tahun 2015 – 2019	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2015 – 2019, permasalahan kehutanan yang cukup marak adalah perambahan kawasan hutan dan penggunaan kawasan yang tidak prosedural, pembalakan liar di beberapa provinsi, serta peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Dalam rangka penyelesaian permasalahan kehutanan tersebut perlu adanya keterlibatan para *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga Non Pemerintah) dikarenakan permasalahan kehutanan yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan. Perlu adanya strategi dan upaya bagaimana mengatasi permasalahan kehutanan saat ini dan kedepan. Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Direktorat PPH) sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah berkomitmen untuk memberantas pembalakan liar yang terjadi di seluruh Indonesia dan kejahatan kehutanan lainnya seperti perambahan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan preventif dan represif terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kapasitas sarana prasarana pengamanan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi; kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;

- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- e. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2014 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, organisasi dan tata kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sumatera
2. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Jawa dan Bali yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Jawa dan Bali
3. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
4. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
5. Sub Bagian Tata Usaha, yang secara administratif dan fungsional dibawah binaan Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera

D. Sumber Daya

Sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPH adalah pencegahan dan pengamanan kawasan hutan, baik Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi (KSA/KPA/TB), dan kawasan-kawasan lain yang bernilai konservasi tinggi yang berada pada berbagai tipe ekosistem seperti terumbu karang, karst, dan lahan basah. Selain tanggung jawab menjaga keamanan kawasan hutan Direktorat PPH juga bertanggungjawab terhadap pengamanan peredaran hasil hutan dan TSL ilegal yang berada di luar kawasan hutan.

Indonesia memiliki kawasan Hutan Lindung seluas 29.66 juta ha dan hutan produksi seluas 68.83 juta ha yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pihak yang dibebani hak pada hutan produksi. Namun demikian, dalam hal pencegahan dan pengamanan hutan Direktorat PPH mencakup tanggung jawab untuk kegiatan pengamanan kawasan hutan lindung dan produksi. Data luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan konservasi tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas Kawasan Hutan

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ribuan Ha)
1	Hutan Lindung	29.661,3
2	Hutan Produksi Terbatas	26.787,9
3	Hutan Produksi Tetap	29.220,3
4	Hutan Produksi Konversi	12.822,8
5	Hutan Konservasi	21.897,8
Jumlah		120.390,1

Sumber: Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, baik jumlah maupun kualitasnya. Kemampuan yang dituntut bagi SDM yang profesional adalah penguasaan dan kemampuannya di bidang administrasi perkantoran, proyek, penyidikan dan perlindungan hutan dan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia. Direktorat PPH dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya memiliki pegawai sebanyak 45 orang dengan tingkat pendidikan mulai SD sampai dengan S2.

Pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengamanan hutan, didukung Polisi Kehutanan sebanyak 612 orang di Ditjen Gakkum LHK, 2.229 orang di Ditjen KSDAE dan Ditjen PPI, 2.809 orang di Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, dan Intel sebanyak 433 orang.

E. Sumber Dana

Sumber dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat PPH dibiayai dari sumber dana APBN DIPA BA 29 Tahun 2019, dengan total anggaran sebesar **Rp. 43.305.480.000,-** (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

F. Sarana Prasarana

Direktorat PPH memiliki dan mendayagunakan sarana prasarana yang merupakan barang milik negara sebagai penunjang/pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor Direktorat PPH. Sarana dan prasarana yang merupakan barang inventaris negara sebagai penunjang/pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPH tersebut antara lain berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, peralatan kursi-meja kerja, lemari, komputer, printer, telepon, faksimili dan kendaraan dinas. Selain sarana prasarana

penunjang di kantor, Direktorat PPH juga bertanggung jawab pada sarana prasarana pengamanan kawasan hutan yang ada di UPT Ditjen Gakkum LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi, seperti mobil dan motor patroli, senjata api, amunisi, seragam Polhut, dll.

G. Peraturan Perundang - Undangan

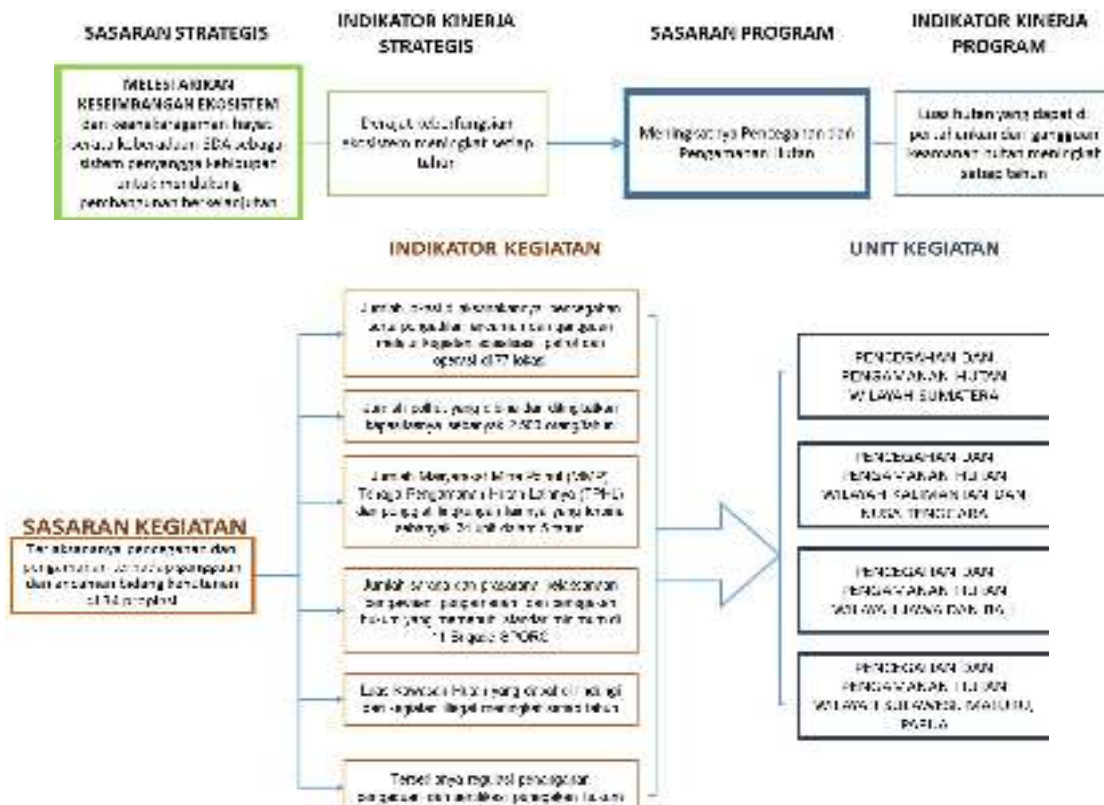
Peraturan perundang-undangan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan ini masih harus terus disempurnakan agar penyelesaian hukum dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akurat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan satwa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Republik Indonesia.
7. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Pananganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Pananganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra 2015 – 2019

Pengamanan aset hutan dan mencegah serta mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan dari kejahatan merupakan kegiatan utama Direktorat PPH. Lingkupan tugas Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan meliputi seluruh hutan di Indonesia yang pengelolaannya merupakan urusan Kementerian LHK. Keberhasilan melaksanakan pencegahan dan pengamanan hutan termaksud di atas memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dilakukan upaya melalui peningkatan kapasitas Polisi Hutan (Polhut) serta peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan pengamanan hutan agar kegiatan tersebut dapat lebih optimal. Setiap Sub Direktorat merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Pencegahan Dan Pengamanan Hutan”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar 1. Setiap Sub Direktorat tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.



Gambar 1 Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Direktorat PPH

B. Rencana Kerja 2019

Rencana strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2015-2019 dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja, maka Direktorat PPH untuk Tahun 2019 menyusun Rencana Kerja yang dibagi dalam dua sasaran kegiatan, yakni:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen satker.
2. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman di bidang kehutanan, yang terdiri atas :
 - a. Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi. Untuk memenuhi capaian ini, luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan diperoleh dari hasil kegiatan operasi pemulihan fungsi kawasan hutan, pengamanan peredaran TSL dan Hasil Hutan Lainnya serta mobilisasi tenaga Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dilakukan pula kegiatan pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan, penyusunan NSPK dan peningkatan kesamaptaaan Polhut.
 - b. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi. Bentuk kegiatan berupa operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di DAS Citarum yang disertai dengan kegiatan kampanye pencegahan perusakan hutan.
 - c. Penyediaan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum. Kegiatan yang ditindaklanjuti antara lain berupa dukungan pengadaan seragam Polhut dan prasarana perkantoran.

C. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PPH tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat PPH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	320.000 Ha
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000 Ha
		Sarana, prasarana, dan kapasitas polisi kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan

Pada tahun 2019, target IKK yang dibebankan kepada Direktorat PPH didasari atas permasalahan prioritas nasional, sementara target lainnya dibagi kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) sesuai proporsi rencana anggaran yang tersedia. Anggaran Direktorat PPH 2019 berdasarkan PK, secara keseluruhan berjumlah **Rp.33.805.480.000 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)**. Selanjutnya diperoleh penambahan anggaran menjadi **Rp. 43.305.480.000,-** (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga target kegiatan bertambah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 Target Kinerja Tahun 2019 Direktorat PPH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.326.000 Ha
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000 Ha
		Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019

A. Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

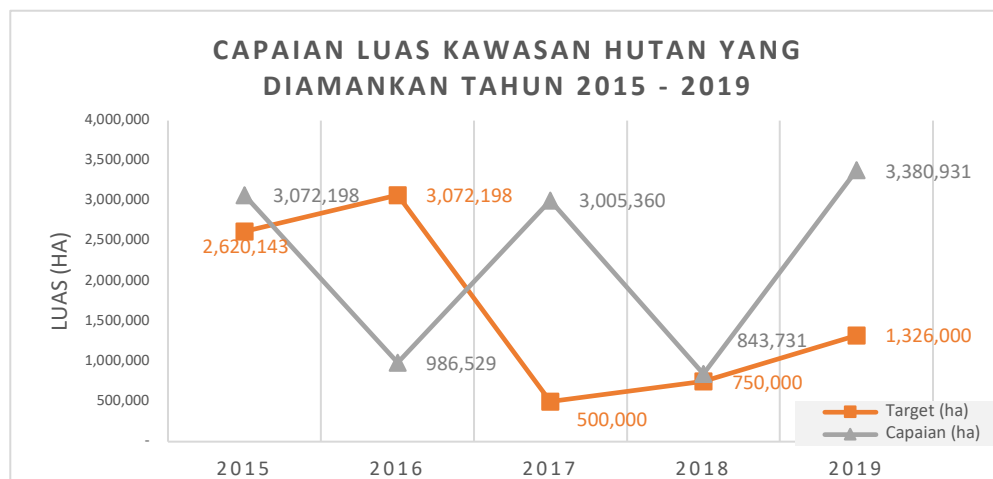
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, capaian pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2019 dapat dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.326.000 Ha	3.373.974,50 Ha	100
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000 Ha	58.034,83 Ha	100
		Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

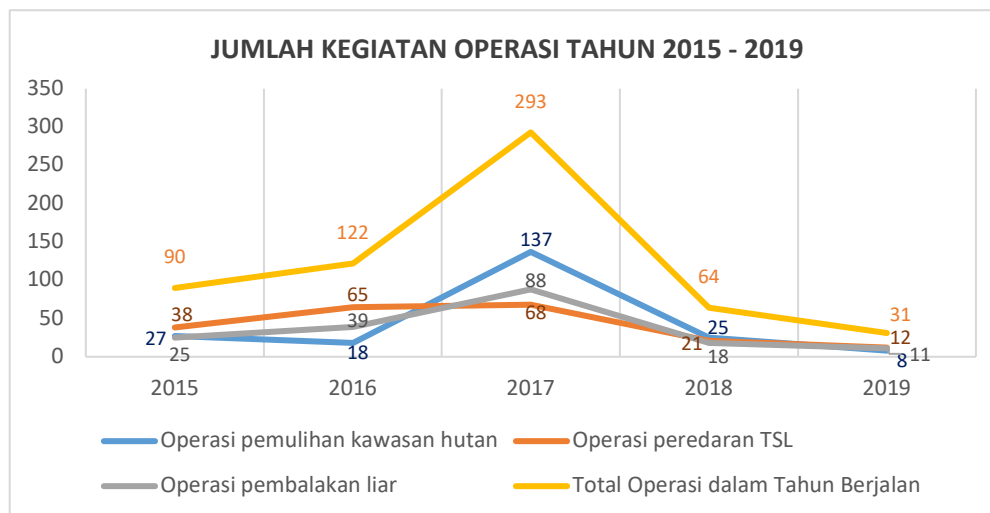
Capaian Kinerja I. Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli, dan Operasi

IKK 1 telah tercapai dengan persentase capaian 100% dengan capaian kawasan hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan seluas 3.380.930,50 Ha, lebih tinggi dari target seluas 1.326.000 Ha.



Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2019, secara keseluruhan Direktorat PPH telah melaksanakan kegiatan operasi sebanyak 31 kali mencakup operasi pemulihan keamanan kawasan hutan sebanyak 8 kali, operasi pembalakan liar 11 kali dan operasi peredaran TSL sebanyak 12 kali.



Gambar 3 Rekapitulasi jumlah kegiatan Operasi tahun 2015 – 2019

Tabel 5 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No.	Kegiatan Operasi	Jumlah Operasi	Hasil yang Diamankan
1	Kejahatan TSL	12	99 ekor satwa liar dan 1.269 buah bagian tubuh satwa liar
2	Pembalakan Liar	11	9.086,20 m3 kayu
3	Pemulihan keamanan kawasan hutan	8	3.380.930,5 Ha

Uraian hasil penanganan kasus prioritas pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Operasi pengamanan peredaran kayu ilegal di Papua, Papua Barat Maluku dan Surabaya

Sejak Desember 2018 sampai dengan November 2019, telah dilakukan upaya penindakan terhadap 26 perusahaan pengedar kayu ilegal di Papua, Papua Barat, Maluku dan Surabaya. Perkembangan penanganan terhadap 19 perusahaan sudah dilakukan proses hukum dengan status P.21. Sebanyak 8 perusahaan diantaranya sudah vonis dan 11 perusahaan sedang proses sidang. Sementara itu 7 perusahaan lainnya sedang dalam tahap penyelidikan.



Gambar 4 Pengamanan barang bukti kayu ilegal asal Papua dan Papua Barat di Surabaya

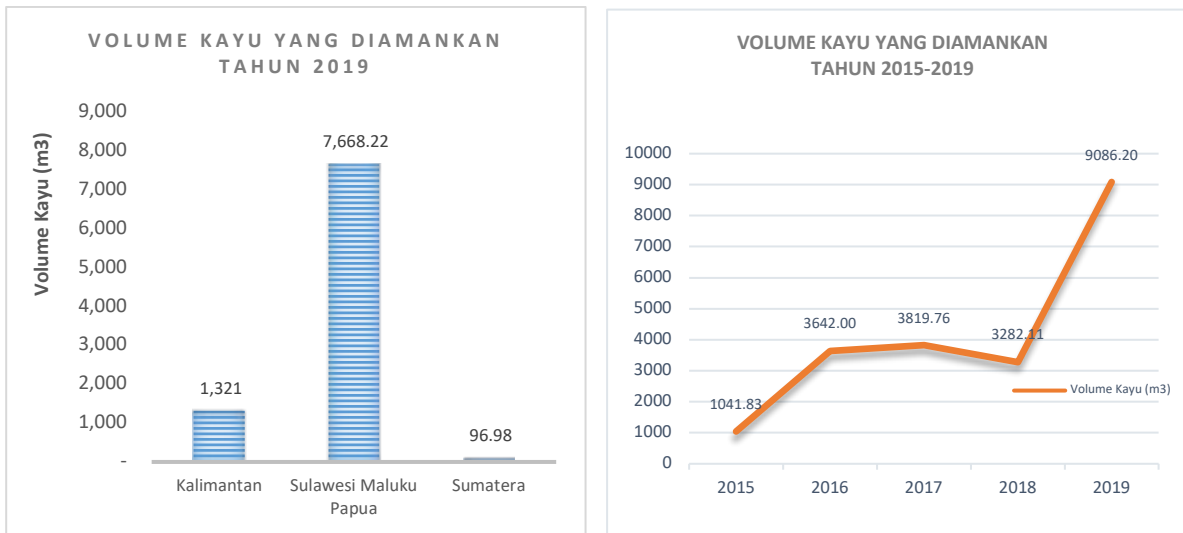
2. Operasi *illegal logging* di Kalimantan

Dilakukan pengamanan terhadap 1.300 m³ kayu ulin dan meranti dan enam Gudang TPTKO di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang diduga menerima, menampung, mengolah dan memperjualbelikan kayu ilegal tanpa disertai dengan dokumen yang sah.



Gambar 5 Barang bukti kayu ilegal di Provinsi Kalimantan Timur

Secara keseluruhan, operasi pembalakan liar dan peredaran hasil hutan yang dilakukan Direktorat PPH tahun 2019 telah berhasil mengamankan kayu sebanyak 9.086,20 m³ dan akumulasi volume kayu diamankan tahun 2015 – 2019 sebanyak 20.871,91 m³.



Gambar 6 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan

3. Operasi pertambangan ilegal di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Aktifitas penambangan ilegal telah dihentikan dan dilakukan penyegelan pada enam lokasi di Kabupaten Bintan (CV. Swa Karya Mandiri, BUMDes Maritim Jaya, PT. Demor Bintan Jaya, PT. Gemilang Mandiri Sukses, CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari), dan selanjutnya akan dilakukan penyegelan terhadap aktifitas penambangan badan usaha lainnya. Pada lokasi CV. Swa Karya Mandiri juga telah dilakukan penyegelan sarana operasional berupa 3 (tiga) unit alat berat dan 1 (satu) unit truk.



Gambar 7 Penyegelan area pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan Provinsi Riau

4. Operasi pertambangan ilegal di Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara

Dilakukan pengamanan terhadap tujuh alat berat dalam kawasan hutan yang digunakan pelaku untuk melakukan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan produksi terbatas di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 8 Penyegehan area pertambangan ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

5. Penyegehan perusahaan pembakar lahan di Kalimantan Barat

Dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan melakukan penyegehan terhadap 29 (dua puluh Sembilan) perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat yang diduga melakukan pembakaran lahan. Lokasi kebakaran tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis hotspot, analisis spasial perijinan perusahaan dan operasi penyelidikan intelijen di lapangan.



Gambar 9 Penyegehan perusahaan pembakar lahan di Provinsi Kalimantan Barat

6. Operasi penambangan ilegal di Cileungsi, Kabupaten Bogor

Pembukaan lahan untuk penambangan batuan tanpa ijin mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk mendukung keberhasilan operasi ini, dilakukan operasi intelijen untuk pengumpulan data dan informasi, penggalangan kepada masyarakat dan pengamanan kegiatan operasi di lapangan. Kegiatan operasi berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 44 Ha, 4 alat berat dan 28 truk angkut.



Gambar 10 Lokasi Operasi Penambangan Ilegal di Cileungsi, Kabupaten Bogor

7. Operasi peredaran ilegal TSL

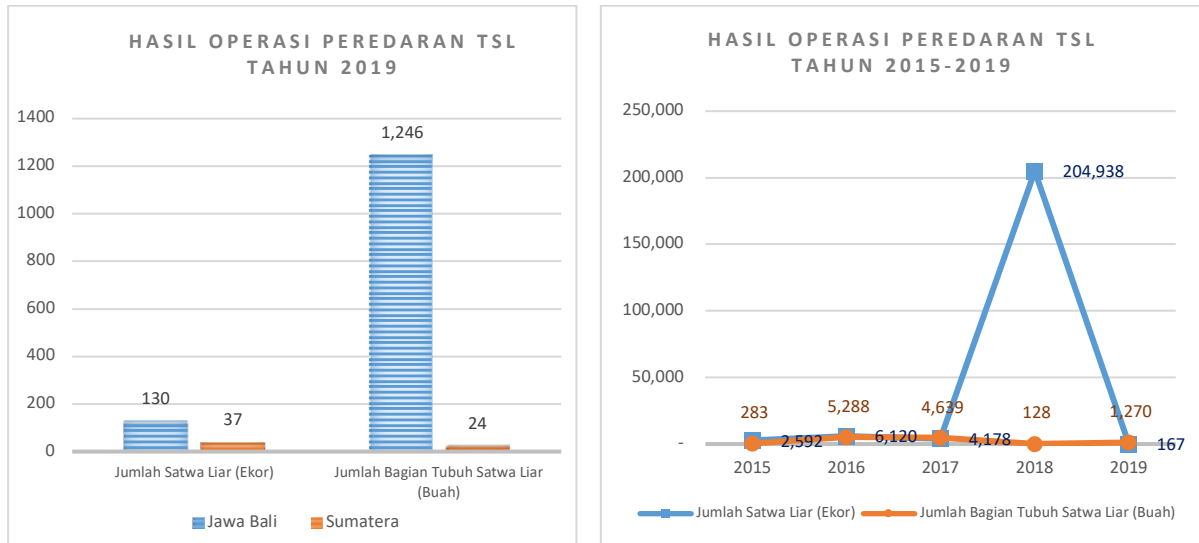
Telah dilakukan operasi peredaran ilegal TSL dengan hasil sebagai berikut:

- a. Penanganan perdagangan bagian-bagian satwa liar dilindungi di Pati, Jawa Tengah berhasil mengamankan gading gajah utuh 30 cm berjumlah 1 buah, Gading gajah potongan berukuran 20-30 cm berjumlah 18 buah, Pipa rokok gading gajah 5-20 cm berjumlah 175 cm, Gelang gading gajah berjumlah 53 buah, Kalung gading gajah berjumlah 4 buah, Gelang akar bahar berjumlah 22 buah, opsetan tanduk rusa berjumlah 7 buah, kuku beruang madu berjumlah 17 buah, dan peralatan pengrajin.
- b. Penanganan terhadap kepemilikan satwa dilindungi yang diindikasikan sindikat jaringan perdagangan satwa secara online di Surabaya Jawa Timur berhasil mengamankan 1 ekor komodo, 4 ekor burung perkici hijau kuning, 8 ekor julang slawesi, 3 ekor nuri merah, 1 ekor kakatua putih, dan 16 offset paruh burung julang Sulawesi.
- c. Penanganan terhadap perdagangan sisik trenggiling di Semarang dan Blora Provinsi Jawa Tengah berhasil mengamankan trenggiling hidup 1 ekor, sisik trenggiling 28.6 kg, opsetan renggiling 1 buah, opsetan kepala kijang 1 buah, dan kerapas labi - labi (*Dogania sp.*) 898 buah.
- d. Penanganan perdagangan Gading Gajah, Harimau Opsetan, Kulit Harimau dan Cula Badak di wilayah Sumatera (Jambi, Riau, Sumut).



Gambar 11 Dokumentasi hasil operasi peredaran TSL

Secara keseluruhan, operasi peredaran TSL yang dilaksanakan Direktorat PPH tahun 2019 telah berhasil mengamankan 167 ekor satwa liar dan 1.270 buah bagian tubuh satwa liar sehingga akumulasi hasil operasi tahun 2015-2019 berhasil mengamankan satwa liar sejumlah 217.995 ekor dan 11.608 buah bagian tubuh satwa liar.



Gambar 12 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2019

Beberapa kegiatan juga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target IKK 1, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi dan kerjasama merupakan suatu interaksi antara instansi untuk mencapai tujuan bersama. Direktorat PPH Ditjen Gakkum LHK telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi, seperti Kejaksaan RI, Bareskrim Polri dan Lembaga Kementerian lain serta asosiasi-asosiasi transportasi umum dan online untuk mencegah, memberantas dan mengurangi tindak pidana kehutanan. Direktorat PPH Ditjen Gakkum LHK pun telah menghadiri undangan rapat rutin Interpol dalam rangka menurunkan tindak pidana kehutanan di dunia.



Gambar 13 Dokumentasi rapat koordinasi penanganan kejahatan kehutanan

2. *Mutual Legal Assistance*

Direktorat PPH bersama Bareskrim Polri melaksanakan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan pemerintah Belanda dalam rangka penanganan kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka warga negara Belanda secara simbolis dari Polri kepada Kejaksaan Negeri Denpasar bertempat di Kantor Polda Bali pada Agustus 2019.



Gambar 14 Dokumentasi pelaksanaan MLA di Denpasar, Bali

3. Penguatan *Operational Room* Ditjen Gakkum LHK

Penguatan *Operational Room* dilaksanakan melalui pengadaan server, pengembangan aplikasi intelijen (On Duty, ECM dan Big Data), dan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Opsroom sebagai berikut:

- a. Pengenalan digital forensik di Yogyakarta.
- b. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah Eropa, Asia dan Amerika di Caserta, Italia.
- c. Inovasi dalam mitigasi resiko bencana di Budapest, Hungaria.
- d. Pelatihan penerbangan pesawat tanpa awak dan pengolahan data di Morowali dan Kendari, Sulawesi Tenggara.



Gambar 15 Dokumentasi kegiatan pelatihan penerbangan pesawat tanpa awak di Sulawesi (kiri) dan pelatihan inovasi dalam mitigasi resiko bencana di Hungaria (kanan)

4. Sosialisasi Sistem Pemantauan Kerawanan Keamanan Hutan (SPARTAN)

Kegiatan sosialisasi SPARTAN telah dilaksanakan di tiga lokasi, meliputi:

- a. Aceh, dengan sasaran Polhut dan tenaga pengamanan hutan lainnya pada BKSDA Aceh.
- b. Bukittinggi, dengan sasaran Polhut yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Balai PPHLHK Wil. Sumatera dan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan tahura Bung Hatta.
- c. Manado, dengan sasaran Polhut dan tenaga pengamanan hutan lainnya pada Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Balai PPHLHK Wil. Sulawesi, Maluku dan Papua.



Gambar 16 Dokumentasi kegiatan sosialisasi SPARTAN di Manado (kiri) dan Bukittinggi (kanan)

5. Operasi Sapu Jerat Wilayah Sumatera dan Sulawesi

Dalam rangka penanggulangan perburuan satwa liar, Direktorat PPH melalui proyek *Combatting Illegal Wildlife Trade* (CIWT) melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Operasi Sapu Jerat, meliputi kawasan hutan pada wilayah kerja Balai Besar KSDA Aceh, Balai Besar KSDA Riau dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

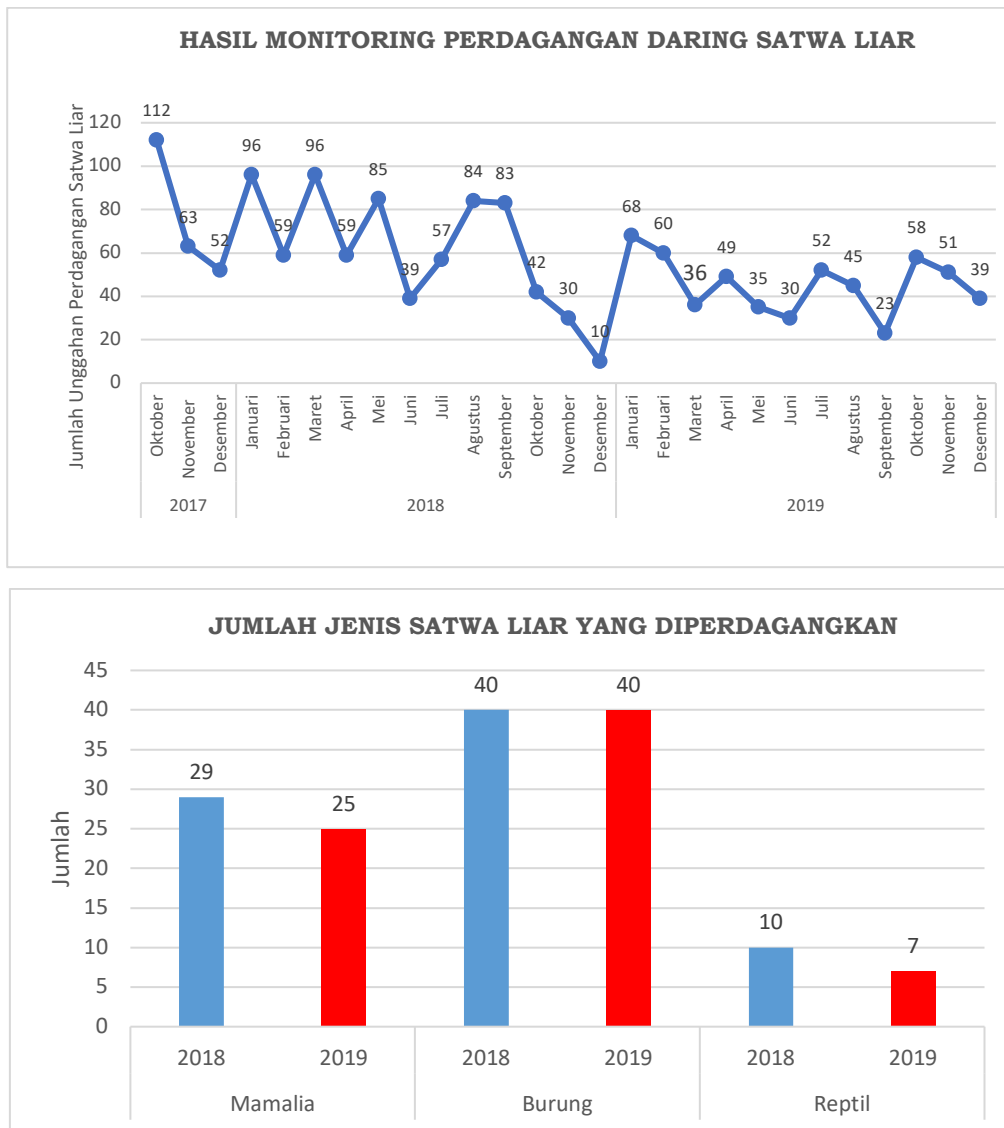


Gambar 17 Dokumentasi jerat yang berhasil diamankan

6. Patroli Siber Perdagangan Daring Satwa Liar

Patroli siber merupakan kegiatan pemantauan peredaran dan/atau perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi melalui media *online*. Sejak Oktober 2017 sd. November 2019, tim Direktorat PPH telah memantau sebanyak 1.275 tayangan di media

sosial dan *e-commerce* terkait dengan perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Hasil pantauan menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar secara online cenderung menurun dari tahun ke tahun.



Gambar 18 Hasil monitoring perdagangan daring satwa liar

7. Pembentukan Kelembagaan dan Desain Sistem Intelijen

Direktorat PPH mendorong terbentuknya kelembagaan Intelijen Polhut melalui penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK No. P7/PHLHK/SET/DIK.3/11/2019 tentang Penyelenggaraan Intelijen Polhut Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Penetapan Anggota Tim Khusus Intel Polhut Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan Nama Sandi "PASOPATI". Dalam rangka mendukung kinerja Intel Polhut dan menjawab tantangan teknologi telah disusun Desain Sistem Intelijen Polhut Berbasis Teknologi dan telah dibangun Prototype Sistem Intelijen Berbasis Teknologi meliputi :

a. Akuisisi Data dan Informasi

Subsistem ini digunakan untuk mendukung pengumpulan data dan informasi yaitu dengan mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di lingkup Kementerian LHK (SIPUHH

Online, Hotspot, Simontana, dll) maupun di eksternal Kementerian LHK (Dukcapil, Ditjen AHU, LAPAN).

b. Analisis

Subsistem ini digunakan untuk membantu dalam analisis data dan informasi, seperti mesin analisis forensik (digital, mobile, komputer dan jaringan), analisis jaringan (networking), analisis media/publik, dan big data sebagai penyimpanan data dan informasi.

c. Aplikasi Pendukung Operasi

Untuk mendukung pelaksanaan operasi dalam sistem ini juga didukung dengan aplikasi antara lain : Cek Posisi Target Operasi, Aplikasi pengawasan dan pengendalian petugas di lapangan.

d. Pelaporan

Dalam sistem ini juga terdapat dashboard untuk menyajikan informasi permasalahan-permasalahan prioritas.



Gambar 19 Tangkapan Layar Sistem Intelijen Polhut

8. Fasilitasi penertiban penggunaan senjata api

Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi penertiban dan pengurusan senjata api dan amunisi yang dikelola oleh 5 (lima) UPT Lingkup Direktorat Jenderal penegakan Hukum LHK dan 32 (tiga puluh dua) Dinas Kehutanan Provinsi terkait penertiban penggunaan dan administrasi pengelolaan senjata api. Sebaran jumlah senjata api sesuai hasil pengecekan fisik senjata api dan penambahan senjata api pengadaan tahun 2018 sebanyak 120 (seratus dua puluh) pucuk yang terdiri dari senjata api jenis Pistol merk P3A sebanyak 20 (dua puluh) pucuk dan jenis senapan merk PM3A1 sebanyak 100 (seratus) pucuk.

Tabel 6 Status senjata api tahun 2019

No	Jenis	Pengadaan	Buatan	Ditjen KSDAE	Ditjen Gakkum	Dinas
1	Pistol CZ 83	1996-1997	Ceko	150	64	280
2	Pistol P3A	2018	Pindad	-	20	-
3	Senapan Molot 12 CA VEPR	2006	Rusia	-	198	-
4	Senapan PM1-A1	1996-1997	Pindad	1,326	195	1,479
5	Senapan PM3-A1	2018	Pindad	-	100	-
Jumlah				1,476	577	1,759

9. Kesamaptaan Polisi Kehutanan

Pada tahun 2019, peningkatan kapasitas tidak menjadi indikator kinerja Direktorat PPH, meski demikian Direktorat PPH tetap melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan Kesamaptaan Polisi Kehutanan. Secara keseluruhan, Direktorat PPH pada tahun 2019 telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Polhut dan tenaga pengamanan hutan lainnya sebanyak 1.198 personil.



Gambar 20 Perbandingan jumlah tenaga pengamanan hutan yang ditingkatkan kapasitasnya

Tabel 7 Jumlah polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Tahun 2019

No	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah peserta (orang)
1	Apel Aparatur Penegakan Hukum LHK	Manggala Wanabhakti, Jakarta	23 - 25 Juli 2019	1.000
2	Latihan Menembak	Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua, Jakarta	28 Oktober 2019	80
3	Diklat Intelejen Dasar I	Pusdik Intelkam Polri Soreang, Bandung	25 Juni – 26 Juli 2019	30
4	Diklat Intelejen Dasar II	Pusdik Intelkam Polri Soreang, Bandung	1 sd. 30 Agustus 2019	30
5	Wanalestari	Manggala Wanabhakti, Jakarta	Juni – Agustus 2019	58
Total				1.198



Gambar 21 Apel Siaga



Gambar 22 Latihan Menembak



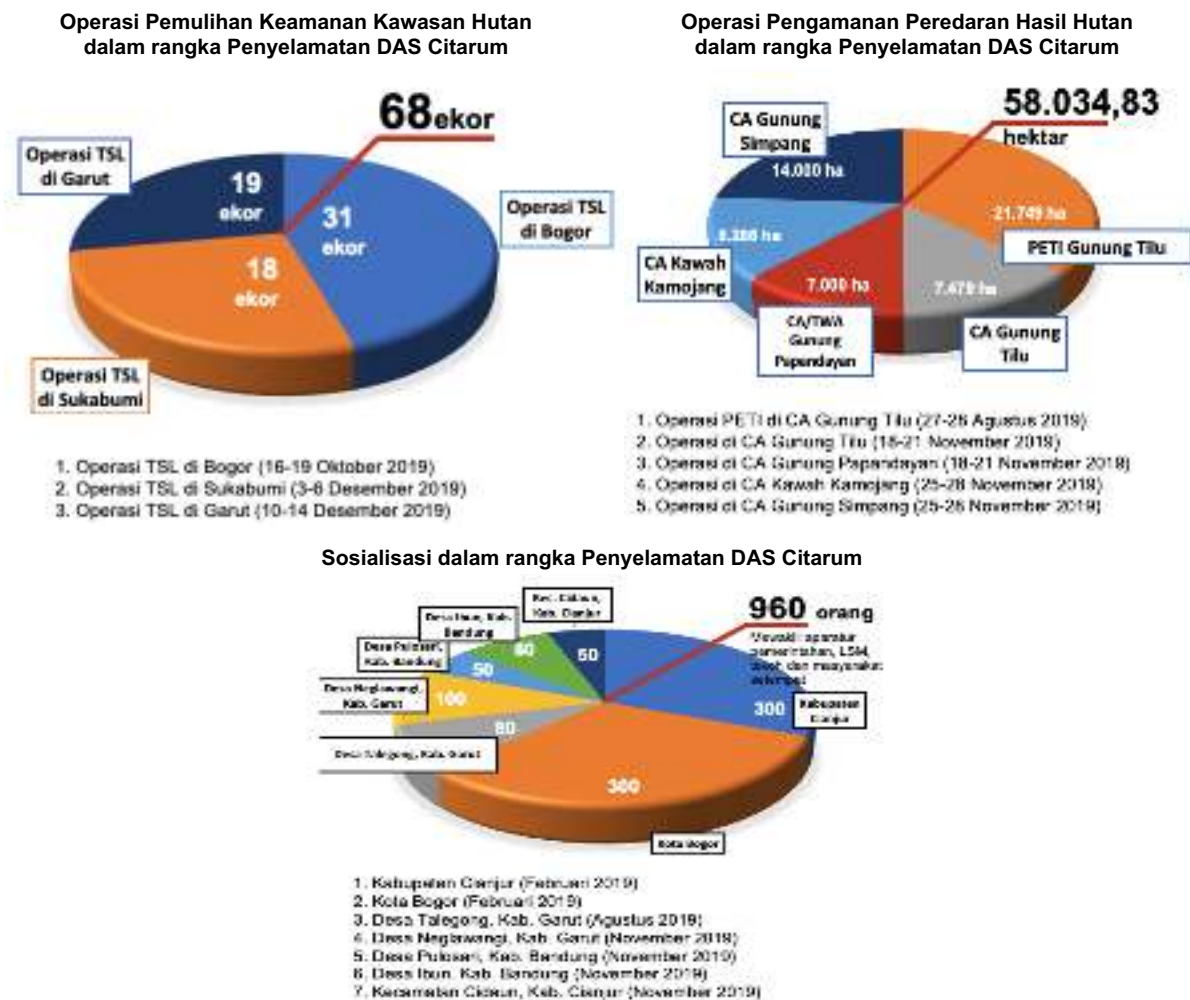
Gambar 23 Diklat Intelijen Dasar



Gambar 24 Penyerahan Penghargaan Wanalestari

Capaian Kinerja II. Luas DAS Citarum yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi

Direktorat PPH bersama Satgas Citarum telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan di Hulu DAS Citarum dengan capaian luas kawasan yang diamankan 58.034,83 Ha.



Gambar 25 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum



Gambar 26 Kampanye / Sosialisasi dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum



Gambar 27 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan untuk Penyelamatan DAS Citarum



Gambar 28 Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan untuk Penyelamatan DAS Citarum

Capaian Kinerja III. Sarana Prasarana Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Memenuhi Standar Minimum

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 telah dilakukan pada 1 lokasi sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu pada kantor Direktorat PPH sehingga realisasasi kinerja mencapai 100%. Pengadaan meliputi perlengkapan pengamanan hutan, peralatan intelijen, dan pengadaan seragam Polhut dan SPORC dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 8 Daftar pengadaan barang dan jasa

No.	Uraian	Jumlah
A	Pengadaan Bangunan, Peralatan dan Mesin	
1	Server Opsroom	1 set
2	Laptop	2 unit
3	Printer warna	4 unit
4	AC portable	1 unit
5	Dispenser	2 unit
6	Coffee maker	1 unit
7	Printer	5 unit
8	Kursi kantor	1 unit
9	LCD portable mini	3 unit
10	Air Cooler	1 unit
11	Microwave	1 unit

No.	Uraian	Jumlah
B	Pengadaan Bahan Seragam Polhut dan SPORC	
1	Bahan kain seragam PDL Polhut	5.300 meter
2	Bahan kain seragam PDL SPORC	1.400 meter
C	Pengadaan Seragam Lapangan Direktorat PPH	
1	Baju seragam	50 unit
2	Sepatu	50 unit
3	Celana	50 unit

Capaian Kinerja IV. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja

Layanan dukungan manajemen satuan kerja telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan dengan realisasi kinerja sebesar 100%, mencakup kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran
Kegiatan mencakup penyusunan RKAKL Direktorat PPH tahun 2020, evaluasi anggaran dan penatausahaan BMN Direktorat PPH.
2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
Kegiatan mencakup pengelolaan Satuan Pengawas Intern Pemerintahan, penyusunan Laporan Tahunan/Lakip Direktorat PPH, Penyusunan Analisa Beban Kerja dan pemutakhiran data pegawai Direktorat PPH.

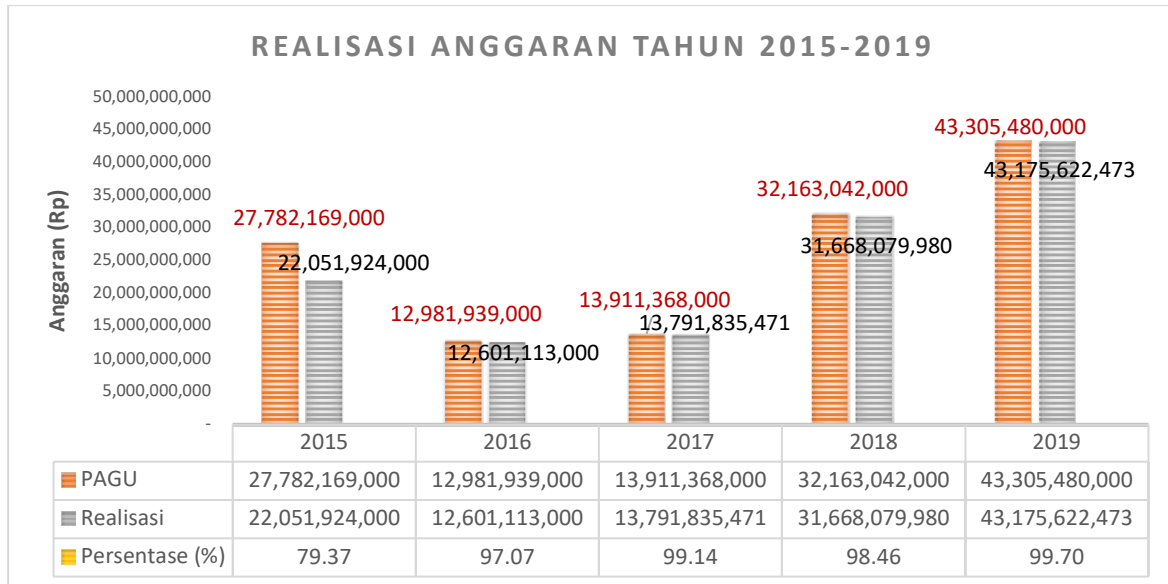
Capaian Kinerja V. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran telah dilaksanakan selama 12 bulan sesuai dengan target sehingga realisasi kinerja sebesar 100%. Pelaksanaan layanan perkantoran berupa kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, biaya operasional pimpinan dan pembayaran terkait operasional kantor.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Perhitungan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat PPH pada tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp.43.175.622.473,- (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apabila dibandingkan dengan target anggaran yaitu sebesar Rp. 43.305.480.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), terlihat bahwa penyerapan anggaran mencapai 99,70%. Persentase serapan anggaran pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi pada lima tahun terakhir.



Gambar 29 Grafik perbandingan realisasi anggaran Dit. PPH tahun 2015 – 2019

Perhitungan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Pada tahun 2019, anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal. Besarnya realisasi anggaran per IKK tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	28.701.163.000	28.648.302.168	99.82
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	2.381.160.000	2.367.208.142	99.41
		Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	9.867.677.000	9.867.339.644	100.00
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen satker	375.000.000	368.371.800	98.23
		Layanan perkantoran	1.980.480.000	1.924.400.719	97.17
Total			43.305.480.000	43.175.622.473	99.70

Dampak terhadap Indikator Makro Nasional

Dampak kegiatan pencegahan dan pengamanan terhadap indikator makro nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya luas kawasan hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan bidang kehutanan yang ditunjukkan dengan kinerja selama tahun 2019 seluas 3.373.974,50 Ha dan selama tahun 2015-2019 luas kawasan hutan yang diamankan mencapai 14.662.723,50 Ha.
2. Berdasarkan hasil operasi pengamanan peredaran hasil hutan selama tahun 2019, volume kayu yang telah diamankan sebanyak 9.086,20 m³ dan akumulasi volume kayu diamankan tahun 2015 – 2019 sebanyak 20.871,91m³. Apabila diasumsikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu yang berhasil diamankan dihitung berdasarkan Harga Pasar 1 m³ kayu adalah Rp. 3.000.000,- maka dapat diperkirakan nilai kerugian negara akibat peredaran ilegal hasil hutan kayu sebesar Rp. 27.258.600.000,- dan secara keseluruhan pada tahun 2015-2018 adalah sebesar Rp. 62.615.730.000,-.
3. Pelaksanaan kegiatan dan operasi pengamanan peredaran kayu asal Papua telah berdampak dalam perbaikan tata kelola Penatausahaan Hasil Hutan dengan adanya revisi tujuh Peraturan Menteri LHK terkait tata usaha kayu.

C. Capaian Indikator Tujuan

Indikator tujuan telah tercapai melalui pencapaian atas breakdown per tahun dari milestone di dokumen Renstra. Capaian terhadap milestone tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 10 Capaian indikator tujuan tahun 2019

No.	Milestones Tahun 2019	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.326.000 Ha	3.373.974,50 Ha	100
2	Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100

D. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Direktorat PPH adalah Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan yang terdiri atas dua target output sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut. Kegiatan yang menjadi prioritas nasional telah terlaksana secara efisien, terlihat dari nilai serapan anggaran sebesar 99,70 %.

Tabel 11 Capaian kegiatan Prioritas Nasional tahun 2019

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Penyerapan Anggaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	12. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar)	28,701,163,000	28,550,900,179	99.48%	1,326,000	3,303,036	100%
			002. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar)	2,381,160,000	2,367,208,142	99.41%	5,000	58,034.83	100%

E. Capaian Aksi Tematik

Pada tahun 2019, Direktorat PPH memiliki kegiatan yang termasuk Responsive Gender, yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk Polhut/SPORC dan pegawai di lingkup Direktorat PPH. Pelaksanaan kegiatan ini telah memperhatikan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga anggaran responsif gender terlaksana secara efektif dan efisien.

Tabel 12 Capaian aksi tematik tahun 2019

Tematik	Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Penyerapan Anggaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Anggaran Responsif Gender	12. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	004. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum (Lokasi)	9,867,677,000	9,838,107,744	99.70%	1	1	100.00%
Mitigasi perubahan iklim	12. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar)	28,701,163,000	28,550,900,179	99.48%	1,326,000	3,303,036	100%
			002. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar)	2,381,160,000	2,367,208,142	99.41%	5,000	58,034.83	100%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019.
2. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Direktorat PPH pada tahun 2019 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar **100%**.
3. Penyerapan anggaran Direktorat PPH pada tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp.43.175.622.473,- (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)** atau sebesar **99,70%** dari total pagu sebesar **Rp. 43.305.480.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.
4. Permasalahan yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dari setiap kegiatan, program dan pencapaian sasaran adalah terkait dengan anggaran dan kelembagaan meliputi:
 - a. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan sebagian kurang dapat diprediksi tata waktu pelaksanaannya karena tindak pidana kehutanan dapat terjadi sewaktu-waktu.
 - b. Dalam operasi pengamanan hutan membutuhkan pra kondisi yang cukup memakan waktu antara lain koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya, sehingga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu.
 - c. Tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut, SPORC dan PPNS, sangat terbatas bila dibandingkan dengan permasalahan, luas kawasan hutan dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.

B. Saran

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan pencairan dan ketersediaan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai penjadwalan yang telah direncanakan.
2. Memprioritaskan lokasi penanganan tindak pidana kehutanan berdasarkan data kasus dan prioritas tipihut.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut, SPORC dan PPNS Kehutanan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : Ir. Susty Iriyono, M.Si
Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan

Ir. Susty Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	320.000 Ha
		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	5.000 Ha
		Sarana, prasarana, dan kapasitas polisi kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 31.450.000.000 |
| 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; | Rp. 2.355.480.000 |

Total Anggaran

Rp. 33.805.480.000

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620821 199002 1 001

